

**KEPENTINGAN TIONGKOK MENGELUARKAN HAK VETO  
TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB  
TENTANG KONFLIK SURIAH  
TAHUN 2012**

**Siti Nurfazlina<sup>1</sup>**

Email : sitinurfazlina@rocketmail.com

**Pembimbing : Afrizal, S.IP. M.A**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research explains Tiongkok's interests in issuing a veto against the UN Security Council resolution drafts on Syria conflict in 2012. The conflict in Syria is one of the impact of the Arab spring. The conflict in Syria is a civil conflict that demands the Syrian president to step down. In the face of the civil conflict, the Syrian government often used military and armed forces that resulted in the loss of life of many civilians. Seeing the Syrian government action taken in the face of this conflict, the UN Security Council drafted resolutions on Syria to help resolve the internal conflicts. This research will discuss about Tiongkok's interest in Syria conflict so that Tiongkok issued a veto on the UN Security Council resolution. This research applied realisme perspective, Diplomacy theory and Nation-State analys. Realism perspective believes that main actor in international relations is a country. This research collected data from books, journals and websites which discusses the existence of Tiongkok interest in Syria Conflict and Tiongkok reasons issued a veto of UN security Council resolution in Syria conflict. This research found that Tiongkok has a economic and political interests in Syria.*

**Keywords : Syria Conflict, Veto, UN Security Council, Resolutions.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau angkatan 2009 dengan NIM 0901120198

## Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kepentingan Tiongkok menggunakan hak veto terkait resolusi dewan keamanan PBB tentang konflik Suriah. Tercatat sejak awal menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB sampai sebelum konflik Suriah berlangsung, Tiongkok telah menggunakan hak vetonya sebanyak 5 kali. Di antara 5 penggunaan hak veto tersebut tidak sekali pun Tiongkok menggunakannya dalam kasus yang berhubungan dengan wilayah Timur Tengah.

Ketika terjadinya Arab Spring yang merupakan sebuah revolusi di Timur Tengah melanda Negara-negara seperti Kuwait, Lebanon, Mesir dan Libya, Dewan Keamanan PBB juga gencar merumuskan beberapa resolusi guna mencari solusi atas konflik kemanusiaan yang terjadi. Namun, saat itu Tiongkok lebih memilih untuk abstain dan tidak menggunakan hak vetonya. Berbeda dengan Tiongkok, mitra Tiongkok di Dewan Keamanan PBB yaitu Rusia begitu gencar menggunakan hak veto nya terhadap resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada konflik-konflik dinegara-negara tersebut.

Berbeda dengan kasus yang terjadi di Mesir, Lebanon, dan Libya, Tiongkok terkesan sangat tegas dan tidak mau ketinggalan dalam konflik yang terjadi di Suriah. Hal ini ditandai Tiongkok tidak memilih abstain dalam resolusi yang dirumuskan Dewan Keamanan PBB terhadap konflik di Suriah.

Negara Suriah modern didirikan usai Perang Dunia Pertama, yaitu setelah mendapatkan kemerdekaannya dari Perancis pada tahun 1946. Pasca meraih kemerdekaannya, Suriah kerap diguncang oleh gejolak serta kudeta militer, yang sebagian besar terjadi antara periode 1949-1971. Kemudian antara periode 1958-1961, Suriah bergabung dengan Mesir membentuk perserikatan yang dikenal

dengan RPA (Republik Persatuan Arab). Perserikatan itu berakhir karena terjadinya kudeta militer di Suriah. Sejak tahun 1963 hingga 2011, Suriah terus memberlakukan UU Darurat Militer, sehingga dengan demikian sistem pemerintahannya pun dianggap oleh pihak barat tidak demokratis.

Konflik Suriah pada awalnya dimulai dari kekecewaan besar dan penindasan rezim yang berkuasa terhadap rakyatnya sendiri, maka timbulah perlawanan dari rakyat dan akhirnya menjadi perlawanan dan perjuangan secara sistematis untuk mengakhiri rezim. Kemunculan perlawanan rakyat Suriah banyak dipengaruhi oleh '*Arab Spring*' yang melanda negara Tunisia, Mesir, Libya di tahun 2009 sampai dengan 2011. Konflik yang terjadi antara masyarakat oposisi penentang rezim Bashar al Assad dengan pasukan Pemerintah Suriah telah memakan korban tewas sebanyak lebih dari 5000 jiwa dan 300 diantaranya adalah anak-anak sejak Maret 2011.<sup>2</sup>

Konflik domestik ini berkembang menjadi konflik yang terinternasionalisasi setelah Liga Arab mengajukan kasus ini ke Dewan Keamanan PBB. Dalam krisis ini, banyak aktor internasional terlibat diantaranya Liga Arab dan anggota PBB. Menanggapi hal ini, Dewan Keamanan segera mengambil tindakan guna menghentikan konflik di Suriah. Mereka memberikan respons tanggap terhadap konflik internal yang terjadi di Suriah. Tindakan Presiden Suriah Bashar al-Assad menyerang oposisinya dianggap sebagai kejahatan yang harus dihentikan. Dewan keamanan mengecam tindakan tersebut berulang kali dan menghimbau al-Assad untuk menghentikan serangan pada rakyat pro-demokrasi.

---

<sup>2</sup>The Global Review, Ribuan Warga Suriah Dukung Presiden Assad, diakses dari <[www.theglobal-review.com](http://www.theglobal-review.com)>, diakses pada 1 Juli 2015

Berbagai upaya telah ditempuh oleh PBB untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung di Suriah. Mulai dari embargo terhadap ekspor dan impor barang-barang di Suriah, blokade, pembekuan aset Assad, hingga pengutusan mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk membawa proposal damai, namun semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan demi tercapainya perdamaian di Suriah.<sup>3</sup>

Pada tanggal 4 Oktober 2011, Dewan Keamanan PBB melakukan sidang pertamanya terkait konflik sipil Suriah di New York yang diikuti oleh 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap.<sup>4</sup> Dalam sidang tersebut, Dewan Keamanan PBB membahas mengenai rancangan resolusi yang isinya mendukung adanya intervensi militer terhadap pemerintah Suriah, karena pemerintahan Assad dinilai telah banyak sekali melakukan berbagai pelanggaran HAM dengan menggunakan kekuatan militernya untuk melawan rakyat sipil.

Hasil sidang Dewan Keamanan PBB tersebut adalah Tiongkok dan Rusia sebagai anggota Dewan tetap menolak/menveto keputusan tersebut, 9 suara setuju dengan 4 abstain yaitu Brasil, India, Lebanon, Afrika Selatan. Artinya rancangan resolusi tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Tiongkok dan Rusia merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan hak vetonya.

### **Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa Negara bangsa (*nation-state*) yang menitikberatkan pada pembahasan mengenai kepentingan Tiongkok dalam

mengeluarkan hak veto terhadap draft resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Suriah.

Analisa yang menekankan pada tingkat analisa Negara-bangsa berasumsi bahwa semua pengambilan keputusan dimanapun pada dasarnya akan berperilaku sama apabila menghadapi situasi dan kondisi yang sama.<sup>5</sup> Oleh karena itu analisa yang menekankan variasi antar perilaku kelompok pembuat keputusan disuatu Negara atau sekelompok lain dinegara lain adalah sia-sia. Analisa para ilmuwan seharusnya ditekankan pada perilaku unit Negara-bangsa, karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku unit Negara-bangsa, dalam hal ini perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga dan proses perpolitikan mereka hanya diperhatikan sejauh perilaku mereka berkaitan dengan tindakan internasional Negara yang bersangkutan.

Dalam analisa negara bangsa, negara merupakan aktor dominan dan yang paling kuat dalam interaksi dipentas dunia. Negara sebagai aktor relatif bebas dalam menentukan kebijakan apa yang harus diikuti. Kendatipun setiap Negara harus berhubungan dengan realitas system dunia, akan tetapi pada hakikatnya adalah aktor yang mengendalikan system internasional, termasuk negara kecil yang paling lemah sekalipun.<sup>6</sup>

Dalam rangka untuk membantu mempertajam tingkat analisa Negara-bangsa yang dipakai dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dan paradigma *realism*. Pendekatan *realisme* termasuk dalam aliran pemikiran tradisional yang paling tua dalam sejarah pemikiran politik hubungan internasional.

<sup>3</sup>Kinsal, Masni Handayani. *Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional*. Ex et ocietatis. Vol. II. No. 3. April 2014. Hal, 107

<sup>4</sup> Nandanaardi, Dhwan Adhyatmika. *Kebijakan Luar Negei Rusia Terhadap Konflik Suriah Tahun 2011-2012*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol.3.No.1. Maret 2014

<sup>5</sup> Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional*. (Jakarta:LP3S,1990),hal 184

<sup>6</sup> John, T.Raourke, *International Politics on The Worlds Stage*. (USA:University of Connicut, 2001),hal 81

Pendekatan ini menjadikan Negara-negara sebagai unit analisis yang utama (*main unit of analysis*).<sup>7</sup>

Pendekatan realisme memiliki asumsi akan keyakinan bahwa isu-isu internasional mempunyai prioritas atau hierarki dimana kepentingan nasional menempati urutan teratas.<sup>8</sup> Disini Negara sebagai aktor utama memiliki peran dalam menterjemahkan kebijakan yang diarahkan kepada kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Asumsi tersebut dapat dikuatkan oleh **Kenneth Walt** yang mengatakan bahwa Negara adalah aktor terpenting dalam interaksi hubungan internasional dimana proposisi teoritis utama (*main theoretical preposition*) mengarah kepada kompetisi kepentingan Negara-negara secara konstan untuk mendapatkan *power* atau keamanan (*self interest states compete constantly for power or security*).<sup>9</sup>

## Konflik Suriah

Konflik di Suriah diawali pada Maret 2011, pada saat itu terjadi demo oleh warga lokal di wilayah selatan kota Deraa setelah beberapa pemuda membuat slogan terkenal pemberontakan di Mesir “Orang-orang ingin kejatuhan rezim” di dinding-dinding sekolah dan memicu semangat para demonstran. Pada awalnya aksi ini berlangsung damai, akan tetapi setelah adanya pasukan keamanan yang menembaki para demonstran dan menewaskan beberapa orang, terjadilah kerusuhan di wilayah tersebut yang menyebabkan semakin banyaknya demonstran yang turun ke jalan.

---

<sup>7</sup> *Perspektif-perspektif dalam Hubungan Internasional*, <http://www.the-worldpolitics.com?p=6> diakses pada 10 maret 2016

<sup>8</sup> Andrea H.Pareira, “Negara dalam studi Hubungan Internasional: perubahan dan kesinambungan” jurnal antar bangsa II (Januari, 2004), hal.282

<sup>9</sup> *ibid*

Kerusuhan dipicu oleh penuntutan pengunduran diri Presiden Assad<sup>10</sup> yang pemerintahannya berlaku turun-temurun di Suriah dan dianggap diktator. Akan tetapi pihak pemerintah menurunkan pasukan keamanan untuk menyerang pihak oposisi. Pada bulan Juli 2011<sup>11</sup>, ribuan demonstran turun ke jalan dengan mempersenjatai diri mereka untuk perlindungan diri dan melawan pasukan keamanan Suriah. Kekerasan semakin meningkat dan banyaknya korban yang berjatuhan, konflik ini kemudian menjadi perang saudara yang semakin banyak memakan korban. Pada tahun 2012, wilayah konflik semakin meluas dan mencapai Ibukota Damaskus dan kota Aleppo<sup>12</sup>.

Konflik ini semakin banyak ikut campur militer dan memacu siklus pembunuhan warga sipil yang memunculkan pihak oposisi ekstrimis antara bulan November 2011 dan Desember 2012. Salah satunya adanya aliansi dengan Al-Qaeda yaitu *Jabhat al Nusra* yang mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas hampir 600 penyerangan di Suriah dan lebih dari 40 penyerangan bunuh diri untuk senjata kecil dan improvisasi operasi peledakan<sup>13</sup>. Pembelot militer dan rakyat sipil bersenjata mampu mengalahkan pasukan keamanan negara pada awal konflik yang memungkinkan pihak oposisi mampu menguasai wilayah dan mengganggu

---

<sup>10</sup> dr. Bashar al-Assad adalah Presiden Republik Arab Suriah, Sekretaris Wilayah Partai Baath, dan anak mantan Presiden Hafizh al-Assad. Bashar menggantikan ayahnya sebagai Presiden Suriah segera setelah kematiannya pada 10 Juni 2000.

<sup>11</sup> BBC, Syria: The Story of the Conflict, Oktober 2015, terdapat di [www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868](http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868) diakses pada 14 Desember 2015 pukul 15.04 WIB

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Congressional Research Service, *Armed Conflict in Syria: Overview and U.S Response*, hal.9, 2015, terdapat di <https://www.fas.org/srg/crs/mideast/RL33487.pdf> diakses pada 14 Desember 2015 pukul 19.21 WIB

kontrol pemerintah atas wilayah Suriah dan warganya.

Konflik ini semakin membesar dan pada bulan Juni 2013, PBB menyatakan 90.000 jiwa terbunuh pada konflik ini dan pada Agustus 2014 jumlahnya menjadi 191.000 jiwa dan meningkat menjadi 250.000 jiwa pada Agustus 2015<sup>14</sup>. Konflik ini sekarang bukan hanya menjadi konflik dari pihak oposisi melawan pihak pemerintahan Assad, tetapi konflik ini kemudian menjadi konflik kemanusiaan yang memunculkan banyaknya pihak yang menyatakan diri berjihad dan pihak-pihak yang membela korban, sehingga banyak campur tangan dari berbagai pihak. Konflik ini semakin banyak memakan korban jiwa yang tidak bersalah.

Komisi PBB menyelidiki adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan sejak Maret 2011, yang telah ditemukan bukti bahwa di kedua pihak yang berkonflik telah melakukan kejahatan perang yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penghilangan paksa, selain itu kedua pihak juga menghambat akses makanan, air dan pelayanan kesehatan yang menyebabkan penderitaan rakyat sipil. Pada tahun 2015, serangan udara yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dan Rusia telah menyebabkan puluhan warga sipil tewas. Serangan ini terjadi pada minggu pagi 13 Desember 2015 di pinggiran kota Damaskus. Setidaknya ada 41 warga sipil tewas termasuk sembilan anak kecil dan 250 warga lainnya terluka<sup>15</sup>. Selain itu juga terjadi serangan bom mobil di hari yang sama dengan jumlah korban 16 jiwa. Sejak konflik 2011, telah banyak korban

yang sudah tewas, setidaknya 250.000 jiwa meninggal dunia.

Upaya penggulingan pemerintahan Bashar Al-Assad dapat dikategorikan sebagai upaya yang tidak gampang, alasan lain kenapa posisi Presiden Assad masih sulit diturunkan adalah karena Suriah merupakan negara yang lebih stabil dalam militer dan pemerintahan dibandingkan negara Arab lain yang terkena dampak *Arab Spring*<sup>16</sup>. Rezim Assad membangun pemerintahan dengan menempatkan tentara sebagai simbol kekuasaan dan alat untuk mengontrol negara<sup>17</sup>. Dalam beberapa hal, militer digunakan untuk menekan dan menghadapi rakyat dengan kekerasan demi mempertahankan stabilitas negara. Rezim ini dibangun diatas empat pilar utama yaitu : kekuasaan di tangan klan Assad, mempersatukan kaum minoritas Alawie, mengontrol seluruh aparaturnya militer intelijen dan monopoli partai Ba'ath atas sistem politik.

Faktor lainnya yang membuat pemerintahan Assad sulit untuk digulingkan karena sikap pemimpinnya yang anti barat dan dukungannya terhadap palestina dianggap menguntungkan untuk mengukuhkan keyakinan rakyat nya, serta pemimpin pasukan elit militer Suriah adalah adik kandung Presiden Bashar Al-Assad yaitu Maher Al-Assad<sup>18</sup>. Penempatan orang-orang kepercayaan juga merupakan faktor penting dalam mencapai kestabilan politik dan militer. Akan tetapi, dengan adanya penyerangan dari pihak pemerintah terhadap pihak oposisi dan warga sipil yang penuh dengan kekerasan

<sup>14</sup> BBC, Op.cit

<sup>15</sup> Al-Jazeera, *Dozen of Syrian Civilans Killed in Air Strike*, di update tanggal 13 Desember 2015 terdapat di [www.aljazeera.com/news/2015/12/dozens-syrian-civilians-killed-air-strikes-151213044411982.html](http://www.aljazeera.com/news/2015/12/dozens-syrian-civilians-killed-air-strikes-151213044411982.html) diakses pada 15 Desember 2015 pukul 12.04 WIB

<sup>16</sup> Kebangkitan dunia Arab atau *Arab Spring* adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Slogan pengunjuk rasa di dunia Arab yaitu *Ash-sha'b yurid isqat an-nizam* ("Rakyat ingin menumbangkan rezim ini")

<sup>17</sup> Kuncahyono, Trias, *Musim Semi di Suriah: Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013, Hal.44

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 85



dan termasuk kedalam kejahatan perang menyebabkan situasi konflik di Suriah semakin memburuk.

Perkembangan yang semakin memburuk di Suriah membuat negara-negara yang berada di kawasan timur tengah yang tergabung dalam Liga Arab memutuskan untuk menanggukuhkan keanggotaan Suriah di organisasi tersebut. Liga Arab memberikan sanksi kepada Suriah berupa sanksi Politik dan sanksi Ekonomi dengan tujuan menyelesaikan konflik Suriah, karen pemerintahan Suriah gagal menghentikan konflik yang mengorbankan banyak jiwa. Organisasi Konferensi Islam (OKI) meminta Suriah untuk bekerjasama dengan Liga Arab untuk meminta Presiden Assad turun dari jabatannya. Namun usaha ini tidak berhasil, dan akhirnya Liga Arab meminta bantuan PBB untuk ikut campur dalam penyelesaian konflik<sup>19</sup>.

### **Peran Tiongkok di Konflik Suriah**

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan bilateral cukup baik dengan Suriah. Tiongkok melakukan kerjasama dengan Suriah sejak tahun 1956 dengan ditandai diresmikannya perwakilan masing-masing negara. Dengan demikian, hubungan Tiongkok dan Suriah sudah lama berlangsung. Ketika terjadinya konflik Suriah, beberapa pihak mengatakan bahwa Tiongkok memiliki peran tertentu di konflik Suriah.

Semakin kacaunya keadaan situasi politik di Suriah menyebabkan beberapa negara di dunia melakukan kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah Assad maupun pihak oposisi. Pihak-pihak internasional juga melakukan langkah-langkah diplomatik untuk menghentikan aksi-aksi

kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di konflik Suriah. Pada tahun 2012 pihak Tiongkok mengatakan bahwa utusan negara Tiongkok telah bertemu dengan pimpinan Liga Arab di Kairo untuk membahas masalah konflik di Suriah terkait Veto yang dikeluarkan oleh Tiongkok terhadap resolusi DK PBB yang sudah lama ini di perjuangkan oleh Liga Arab<sup>20</sup>. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak bertukar pandang mengenai solusi politik atas krisis Suriah. Tiongkok dan Liga Arab memiliki kesepakatan yang cukup besar mengenai hal-hal yang harus dicapai dalam penyelesaian konflik Suriah.

Terdapat beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa Tiongkok merupakan negara penyuplai senjata ke Suriah. Tiongkok telah lama bekerja sama dengan Suriah terkait perdagangan senjata. Pada tahun 1988, Tiongkok menjual rudal M-9<sup>21</sup> ke Suriah walaupun ditentang oleh AS. Diplomat AS pada masa itu membujuk Beijing untuk membatalkan pengiriman. Pada tahun 1991, Presiden Bush mengakhiri penjualan teknologi satelit ke Tiongkok karena menjual senjata ke Suriah hingga Tiongkok berjanji untuk berhenti, bahkan Menteri Luar Negeri Amerika pada saat itu menunda kunjungannya ke Beijing terkait masalah ini.

Tiongkok masih tetap melakukan penjualan senjata ke Suriah, meskipun tidak menjual rudal ke Suriah, Tiongkok masih menjual komponen rudal ke Suriah. Pada tahun 1996, Tiongkok tertangkap lagi menjual teknologi rudal ke Suriah dan

---

<sup>19</sup> Irdyanti, *Kebijakan Penolakan Rusia Terhadap Strategi Barat di Suriah*, Jurnal Transnasional vol.4 No.1 Juli 2012, Pekanbaru : HI UR

---

<sup>20</sup> Arab News, *China Says Envoy met Arab League Head on Syria*, di update tanggal 14 Februari 2012 terdapat di [www.arabnews.com/node/406499](http://www.arabnews.com/node/406499) diakses pada 17 Desember 2015 pukul 14.41 WIB

<sup>21</sup> Rudal M-9 merupakan rudal buatan China yang memiliki hulu ledak tunggal yang memiliki jangkauan mencapai 600 Km dengan akurasi 300 m CEP terdapat di [missilethreat.com/missiles/m-9-variant/](http://missilethreat.com/missiles/m-9-variant/) diakses pada 17 Desember 2015 pukul 15.03 WIB

pada tahun 1999 telah dikirim 10 ton bubuk aluminium ke *Centre des Etudes de Recherche Scientifique* (CERS), pusat pengoperasian program rudal bangsa di Suriah. Penjualan ini terus berlangsung hingga tahun 2000-an. Pada tahun 2002, Tiongkok mengusulkan pusat produksi ke Suriah, dan hingga tahun 2010 Tiongkok termasuk kedalam lima negara penyedia senjata konvensional di Suriah<sup>22</sup>. Kerjasama ini sudah berlangsung dari masa pemerintahan Hafeez Al-Assad hingga masa pemerintahan anaknya Bashar Al-Assad.

Pada tahun 2011, terjadi kerusuhan di Suriah dan pemerintah Suriah menanggapi dengan perlawanan militer yang kejam sehingga terjadi konflik yang semakin besar. Pada tahun 2012, mantan wakil Tiongkok untuk PBB Li Baodong berkomentar bahwa sangat penting untuk mengakhiri kekerasan di Suriah, namun pada kenyataannya Tiongkok masih mensuplai senjata ke Suriah. Dengan demikian Tiongkok berperan dalam konflik di Suriah sebagai penyuplai senjata ke Suriah. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena apabila Tiongkok menghentikan suplai senjatanya ke Suriah, tentu kekerasan dengan senjata akan berkurang. Selain itu, senjata kimia yang digunakan oleh pemerintah Suriah dalam beberapa kasus penyerangan di Suriah, juga diperkirakan sebagai senjata kimia yang di suplai oleh Tiongkok.

Tiongkok juga mengeluarkan hak veto nya terhadap beberapa resolusi DK PBB terhadap konflik Suriah. Ketika terjadi konflik di Libya dan Tunisia serta Mesir, Tiongkok memilih abstain di DK

PBB terhadap intervensi militer asing di wilayah timur tengah. Namun Tiongkok mengambil tindakan tegas pada konflik di Suriah. Tiongkok dan Rusia mengeluarkan hak veto dalam tiga resolusi DK PBB yang dikeluarkan terkait konflik Suriah, dan Tiongkok menolak keras adanya intervensi militer asing di Suriah. Walaupun terdapat kecaman keras dari negara barat, Tiongkok tetap bertahan pada kebijakannya untuk menolak segala bentuk intervensi militer asing di Suriah. Selain itu, Tiongkok juga menunjukkan upaya perkembangan diplomasinya terhadap dunia internasional melalui penyelesaian krisis di Suriah untuk meningkatkan profil diplomatiknya di internasional, serta menunjukkan *power* nya di internasional.

Tiongkok dan Rusia juga menyatakan bahwa harus adanya gencatan senjata di Suriah, tetapi Tiongkok, Rusia dan Iran tetap menolak segala bentuk intervensi di Suriah termasuk intervensi badan perdamaian dunia. Segala bentuk penolakan ini dimaksudkan untuk mencegah Suriah mengalami nasib yang sama dengan Libya dan negara lainnya yang terkena dampak *Arab Spring*. Dengan begitu, hingga saat ini Bashar Al-Assad masih memegang pemerintahan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini adalah dengan gencatan senjata dari pihak pemerintah Suriah dan dari pihak oposisi, dan kemudian menemukan *win-win solution* bagi kedua belah pihak.

Tiongkok dengan kata lain bekerja keras untuk mendapatkan banyak senjata bagi Suriah dan mengabaikan protes dari Amerika Serikat. Tiongkok dan Rusia memiliki peran penting dalam pengembangan militer Suriah dan mencoba menjaga senjata Suriah dari pengamanan Amerika Serikat dan negara lain. Akan tetapi dengan semakin meluasnya kecaman internasional terkait konflik Suriah, Tiongkok berupaya mengatakan bahwa pemerintah mereka

---

<sup>22</sup> David Volodzko, *China's Role in Syria Crisis, Revisited : A Look at History proves China's Leading Role in Arming the Assad Regime, thus Contributing to Today's Civil War*, di update tanggal 28 September 2015, terdapat di [thediplomat.com/2015/09/chinas-role-in-the-syria-crisis-revisited/](http://thediplomat.com/2015/09/chinas-role-in-the-syria-crisis-revisited/) diakses pada 17 Desember 2015 pukul 15.20 WIB

tidak terlibat dalam bentuk bantuan apapun pada Suriah.

### **Sikap Resmi Tiongkok pada Konflik Suriah<sup>23</sup>**

Kecaman internasional terhadap kekerasan yang terjadi di konflik ini pun semakin meluas. Konflik ini memunculkan banyaknya intervensi dari berbagai negara baik adanya upaya intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara lainnya, serta sanksi penghentian sementara kerjasama ekonomi dengan Suriah yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Sedangkan Tiongkok dan Rusia menentang semua upaya intervensi militer di Suriah baik bagi PBB ataupun badan internasional lainnya. Berikut ringkasan mengenai sikap pemerintah Tiongkok terkait konflik Suriah :

1. Pada Bulan Oktober 2011, Tiongkok dan Rusia memveto resolusi sanksi yang disusun oleh Eropa mengutuk konflik di Suriah
2. Pada tanggal 4 Februari 2012, Rusia dan Tiongkok melakukan veto terhadap resolusi DK PBB yang diusulkan oleh Liga Arab mengenai penuntutan mundurnya Presiden Bashar Al-Assad. 13 Negara anggota DK PBB lainnya menyetujui resolusi tersebut. pada 16 Februari 2012, Tiongkok dan Rusia menyetujui rancangan resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk konflik Suriah yang diadopsi oleh margin 137-12 dengan 17 Abstain.
3. Pada tanggal 1 Maret 2012, Tiongkok dan Rusia menentang rancangan resolusi Dewan HAM PBB terkait kekerasan di Suriah
4. Pada 19 Juli 2012, Tiongkok dan Rusia memveto resolusi DK PBB yang disponsori oleh Inggris untuk memberikan sanksi ekonomi karena gagalnya pemerintah Suriah melaksanakan perdamaian sesuai dengan kesepakatan pada bulan maret.

### **Tiongkok Veto Resolusi DK PBB S/2012/77<sup>24</sup>**

Pada draft ini terdapat beberapa tuntutan untuk mencapai resolusi damai yaitu :

1. Mengutuk bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh pemerintah Suriah seperti, penggunaan kekuatan terhadap warga sipil, sewenang-wenang, pembunuhan dan penganiayaan terhadap demonstran dan awak media, penahanan dan penghilangan paksa, gangguan akses ke perawatan medis, penyiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan termasuk kepada anak-anak
2. Tuntutan bahwa pemerintah Suriah segera mengakhiri semua pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap mereka dan melaksanakan hak kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berserikat, melindungi penduduknya, sepenuhnya memenuhi kewajiban di bawah hukum internasional yang berlaku dan menerapkan

---

<sup>23</sup> Michael D. Swaine, *Chinese View of the Syrian Conflict*, terdapat di [carnegieendowment.org/files/swaine\\_clm\\_39\\_091312\\_2.pdf](http://carnegieendowment.org/files/swaine_clm_39_091312_2.pdf) diakses pada 17 Desember 2015 pukul 17.34 WIB

---

<sup>24</sup> UN Security Council, *Op.Cit*



- sepenuhnya Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia S-16/1 S-17/1 S-18/1 dan Resolusi Majelis Umum A/RES/66/176
3. Mengutuk semua kekerasan terlepas darimana asalnya, dalam hal ini termasuk menuntut segala pihak di Suriah termasuk kelompok bersenjata, segera memberhentikan segala tindakan kekerasan atau pembalasan, termasuk penyerangan ke Lembaga Negara sesuai dengan statuta inisiatif Liga Arab
  4. Ingat bahwa semua yang bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindakan kekerasan, harus bertanggung jawab
  5. Tuntutan bahwa pemerintah Suriah, sesuai dengan rencana aksi Liga Arab pada 2 November 2011 dan keputusan pada 22 Januari 2012, tanpa penundaan :
    - a. menghentikan semua kekerasan
    - b. membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang karena insiden ini
    - c. menarik semua pasukan militer dan bersenjata Suriah dari kota-kota, dan mengembalikan mereka ke barak, rumah asli mereka
    - d. menjamin kebebasan demonstrasi damai
    - e. memungkinkan akses penuh dan tanpa hambatan dan gerakan untuk semua Liga yang relevan serta media di seluruh bagian Suriah untuk menentukan kebenaran tentang situasi di lapangan dan memantau insiden yang sedang berlangsung; dan
    - f. memungkinkan akses penuh tanpa hambatan bagi Liga Arab
  6. Panggilan untuk proses politik Suriah yang dipimpin secara inklusif dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan, ketakutan, intimidasi dan ekstremisme, dan ditujukan untuk menangani aspirasi efektif yang sah dan kekhawatiran penduduk Suriah tanpa *prejudging* akhirnya
  7. Mendukung penuh dalam hal ini statuta Liga Arab pada 22 Januari 2012. Keputusan untuk memfasilitasi transisi politik Suriah yang dipimpin demokratis, sistem plural politik, dimana warga negara adalah sama terlepas dari afiliasi mereka atau etnis atau keyakinan, termasuk dialog politik yang serius antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi dibawah naungan Liga Arab sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Liga Arab
  8. Mendorong Liga Arab untuk melanjutkan upayanya dalam kerjasama dengan semua pihak kepentingan di Suriah
  9. Menyerukan kepada pihak berwenang Suriah, dalam hal kembalinya misis penyelamat untuk bekerjasama sepenuhnya dengan Liga Arab sesuai protokol 19 Desember 2011, termasuk melalui pemberian akses penuh dan tanpa hambatan dan kebebasan gerakan ke pengamat, memfasilitasi masuknya peralatan teknis yang diperlukan untuk misi, menjamin misi yang tepat untuk mewawancarai secara bebas atau secara pribadi, dan penjaminan tidak menghukum,

- melecehkan, atau membalas setiap orang yang telah bekerjasama dengan misi
10. Menekankan kebutuhan untuk semua yang memberikan bantuan yang diperlukan untuk misi sesuai dengan protokol Liga Arab 19 Desember 2011 dan diputuskan tanggal 22 Januari 2012
  11. Tuntutan bahwa pemerintah Suriah bekerja sepenuhnya dengan Kantor Komissaris Tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk dengan Komisis penyelidikan yang dikirim oleh Dewan Hak Asasi manusia, termasuk dengan memberikan hak penuh tanpa hambatan ke negara
  12. Panggilan kepada pemerintah Suriah untuk memungkinkan akses yang aman dan tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke orang yang membutuhkan bantuan
  13. Menyambut upaya Sekretaris Jenderal untuk memberikan dukungan kepada Liga Arab, termasuk misis pengamat dalam mempromosikan misi damai untuk konflik Suriah
  14. Permintaan Sekretaris Jenderal untuk melaporkan pelaksanaan Resolusi ini dan konsultasi dengan Liga Arab dalam waktu 21 hari setelah adopsi, dan melaporkan setiap 30 hari sesudahnya
  15. memutuskan untuk meninjau pelaksanaan Resolusi ini dalam waktu 21 hari dan dalam hal ketidakpatuhan, dan mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut
  16. Memutuskan untuk tetap aktif walaupun terkait masalah ini

Pada dasarnya Tiongkok dan Rusia sama-sama menentang draft resolusi yang disarankan oleh Liga Arab ini karena mereka merasa bahwa tidak adil hanya pihak Suriah saja yang dirugikan. Menurut Tiongkok dan Rusia, intervensi militer melanggar piagam PBB yang mengatakan bahwa suatu negara tidak boleh ikut campur terhadap masalah internal negara manapun. Tiongkok menentang adanya intervensi militer, belajar dari konflik Libya yang justru menambah krisis kemanusiaan. Atas alasan tersebut Tiongkok dan Rusia kembali memveto draft resolusi DK PBB untuk kedua kalinya.

### **Kepentingan Ekonomi dan Politik Tiongkok di Suriah**

Negara Suriah memegang peranan penting bagi Tiongkok. Hubungan antara kedua negara tersebut lebih cenderung pada sektor ekonomi yaitu perdagangan dan eksplorasi minyak. Bahkan Tiongkok dan Suriah telah memulai hubungan dagangnya sejak dulu, di mana Damaskus adalah salah satu rute Jalur Sutra yang terkenal.<sup>25</sup> Menurut data dari Economy Watch, pada Tahun 2010 Tiongkok adalah negara pengimpor kedua terbesar bagi Suriah setelah Arab Saudi. Tercatat nilai impor Suriah terhadap Tiongkok adalah 1,4 Miliar USD. Sudah tentu itu bukanlah jumlah yang bisa dianggap kecil. Tiongkok juga mengadakan kerjasama ekonomi dalam bidang eksplorasi perminyakan. Tiongkok dan Suriah memiliki hubungan perdagangan yang sangat signifikan. Pada tahun 2009, perdagangan antara kedua negara tersebut bernilai hampir US \$ 2,2 milyar menurut

<sup>25</sup>Economic and Commercial Councillor's Office of the Embassy of People's Republic of China in The Syrian Arab Republic, "Brief Introduction of China-Syria Trade, <<http://sy2.mofcom.gov.cn/aarticle/bilateralcooperation/inbrief/200412/20041200008533.html>> diakses 20 Juni 2015

angka dari Dana Moneter Internasional, dan volume perdagangan serupa diharapkan oleh Kementerian Ekonomi Suriah bertahan hingga tahun 2010. Perdagangan, merupakan sumbangan terbesar dalam hubungan bilateral kedua Negara tersebut.

Ekspor dari Suriah ke Tiongkok mencapai 1% dari total volume perdagangan sebesar US \$ 5,6 juta, sedangkan ekspor dari Tiongkok ke Suriah adalah senilai \$ 2,2 milyar membuat Tiongkok menjadi importir utama bagi Suriah. Tiongkok secara aktif terlibat dalam industri minyak Suriah. *China National Petroleum Corporation* adalah mitra *joint venture* dengan perusahaan minyak nasional Suriah dan *Royal Dutch Shell* di Al-Furat Petroleum Company, produksi minyak konsorsium utama di negara tersebut. Al-Furat konsorsium memproduksi sekitar 100.000 barel per hari ( bph). Selain itu, Sinochem adalah perusahaan minyak Tiongkok yang telah sangat aktif dalam tender eksplorasi minyak di Suriah. CNPC dan Sinopec membantu untuk menghidupkan kembali output di bawah kontrak rehabilitasi ladang minyak mentah skala kecil di Suriah.

Tiongkok telah lama bekerja sama dengan Suriah terkait perdagangan senjata. Pada tahun 1988, Tiongkok menjual rudal M-9 ke Suriah walaupun ditentang oleh AS. Diplomat AS pada masa itu membujuk Beijing untuk membatalkan pengiriman. Pada tahun 1991, Presiden Bush mengakhiri penjualan teknologi satelit ke Tiongkok karena menjual senjata ke Suriah hingga Tiongkok berjanji untuk berhenti, bahkan Menteri Luar Negeri Amerika pada saat itu menunda kunjungannya ke Beijing terkait masalah ini. Tiongkok masih tetap melakukan penjualan senjata ke Suriah, meskipun tidak menjual rudal ke Suriah, Tiongkok masih menjual komponen rudal ke Suriah.

Pada tahun 1996, Tiongkok tertangkap lagi menjual teknologi rudal ke Suriah dan pada tahun 1999 telah dikirim 10 ton bubuk aluminium ke *Centre des Etudes de Recherche Scientifique* (CERS), pusat pengoperasian program rudal bangsa di Suriah. Penjualan ini terus berlangsung hingga tahun 2000-an. Pada tahun 2002, Tiongkok mengusulkan pusat produksi ke Suriah, dan hingga tahun 2010 Tiongkok termasuk kedalam lima negara penyedia senjata konvensional di Suriah<sup>26</sup>. Kerjasama ini sudah berlangsung dari masa pemerintahan Hafeez Al-Assad hingga masa pemerintahan anaknya Bashar Al-Assad.

Selain faktor ekonomi, keputusan Tiongkok dalam menggunakan hak veto pada krisis Suriah dapat dikatakan sebuah titik balik diplomasi Tiongkok terhadap isu-isu di Timur Tengah di Dewan Keamanan. Suriah dinilai memiliki posisi strategis di kawasan Timur Tengah bagi Tiongkok. Pada masa lalu, Tiongkok selalu abstain di Dewan Keamanan terhadap intervensi militer asing di Timur Tengah. Tiongkok dengan prinsip non-intervensi selalu memilih abstain terhadap isu-isu di kawasan Timur Tengah. Peran strategis Suriah di tengah-tengah geopolitik internasional dan kawasan Timur Tengah sangat penting bagi Negara besar seperti Tiongkok

Hubungan Tiongkok dan Suriah dalam bidang politik juga dapat menjadi alasan Tiongkok membuat kebijakan tersebut. Hubungan dalam bidang politik kedua Negara ini dinilai harmonis. Hal ini terlihat jelas saat Suriah mendukung Tiongkok dalam permasalahan Taiwan. Meskipun tidak seintens Rusia, faktor militer juga tidak bisa dianggap enteng. Tiongkok memiliki sejarah kerjasama yang sangat panjang dengan Suriah. Pada tahun 1969, kepala staf Mustafa Tlass memimpin

---

<sup>26</sup> Volodzko, *Op.cit*

misi militer ke Beijing, dengan jaminan senjata dari pemerintah Tiongkok. Pada tahun 1993 dan 1996, Tiongkok dilaporkan telah mereembantu program pengembangan rudal balistik Suriah. Pada tanggal 19 Oktober 1999, Menteri Pertahanan China, Jenderal Chi Haotian, setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Suriah Mustafa Tlass di Damaskus, Suriah, untuk membahas perluasan hubungan militer antara Suriah dan Tiongkok. Hubungan yang sudah lama terjalin dengan baik inilah salah satu hal yang melatarbelakangi mengapa Tiongkok memveto resolusi DK PBB S/2012/77. Salah satu isi resolusi tersebut sangat menagncam pemerintahan Assad yang berisi permintaan mundur dan perbaikan system politik menuju lebih demokratis. Tiongkok yang telah lama menjalin hubungan politik yang baik dengan Suriah tentu saja menentang keras penggulingan pemerintahan Assad mengingat kebaikan Suriah pada masa lalu.

Kebijakan Tiongkok menggunakan hak vetonya juga dilatarbelakangi oleh hubungan baik antara Tiongkok dan Iran serta kemitraan Tiongkok dan Rusia. Hubungan Tiongkok dan Iran sudah lama terjalin. Kebijakan Tiongkok tersebut itu jika di analisa merupakan upaya menjaga hubungan baik dengan Iran yang merupakan Negara utama pemasok kebutuhan minyak Tiongkok

## Simpulan

Konflik di Suriah telah memakan banyaknya korban jiwa yang dikecam oleh banyak pihak termasuk badan perdamaian dunia PBB. Untuk menanggapi masalah konflik di Suriah ini, DK PBB mencoba mengeluarkan resolusi terkait konflik Suriah. Akan tetapi Tiongkok memilih untuk memveto draft resolusi itu yang menyebabkan draft resolusi DK PBB tidak dapat dilaksanakan karena Tiongkok merupakan anggota tetap DK PBB. Selama tahun 2011 hingga 2012, Tiongkok telah

mengeluarkan veto terhadap tiga draft resolusi yang diajukan dalam rapat DK PBB. Ketiga draft resolusi itu adalah Resolusi DK PBB S/2011/612, Resolusi DK PBB S/2012/77 dan Resolusi DK PBB S/2012/538.

Keputusan Tiongkok memveto ketiga resolusi ini adalah karena adanya kepentingan ekonomi politik Tiongkok di Suriah. Hubungan bilateral Tiongkok dan Suriah telah berlangsung lama. Tiongkok juga merupakan salah satu penyuplai senjata terbesar di Suriah. Sementara itu, Suriah menyuplai minyak bagi Tiongkok. Selain kepentingan ekonomi, Tiongkok juga memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Suriah selama ini. Sikap Tiongkok terkait konflik Suriah ini juga dapat meningkatkan kekuatan Tiongkok di Internasional.

## Daftar Pustaka

### JURNAL

CSIS, *Chinesse Foreign Policy*, diakses dari [csis.org/files/publication/091019\\_c\\_hina-bal\\_26-Chinese-Foreign-Policy.pdf](http://csis.org/files/publication/091019_c_hina-bal_26-Chinese-Foreign-Policy.pdf), pada 7 Desember 2015 pukul 12.10 WIB

Guide to the Charter of the United Nations 5e, (New York: United Nations Publications, 1958)

Irdyanti, *Kebijakan Penolakan Rusia Terhadap Strategi Barat di Suriah*, Jurnal Transnasional vol.4 No.1 Juli 2012, Pekanbaru : HI UR

Kinsal, 2014. Masni Handayani. *Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional*. Ex et Societatis. Vol. II. No. 3. April

Morton Halperin. *Bureaucratic Politics: A paradigm and Some Policy Implication, World Politics*, vol .24

## BUKU

Bowett, *Law of International Institutions*, diperbaharui oleh Phillippe Sands dan Pierre Klein, (London: Sweet & Maxwell, 2001)

K.J.Holsti.1983. *"International politics : A Framework for Analysis 6th ed"*. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall International.

Kuncahyono, Trias, Musim Semi di Suriah: Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013

Leland Goodrich (a), *The United Nations*, edisi ketiga, (New York, Vail-Ballou Press, Inc, 1961)

Martin Griffiths. 2001 *"Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mohtar Masoed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta, LP3ES.

## WEBSITE

2004 Summary of China Request to U.S. Under Article 9 of the 1970 UNESCO Convention, *Cultural History and Archaeology of China*, diakses dari [web.archive.org/web/20071215094418/http://exchanges.state.gov/culpro/cn04sum.html](http://web.archive.org/web/20071215094418/http://exchanges.state.gov/culpro/cn04sum.html) pada 7 Desember 2015 pukul 11.26 WIB

China's Security Agenda in 2004. on line info Dienst Ausgabe 2, 2004 dalam [www.kas.de/proj/home/pub/37/1/year-2000/dokument\\_id-4160/](http://www.kas.de/proj/home/pub/37/1/year-2000/dokument_id-4160/).

CIA terdapat di <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html> diakses pada 20 Juni 2015

Congressional Research Service, *Armed Conflict in Syria: Overview and U.S Response*, hal.9, 2015, terdapat di <https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf> diakses pada 14 Desember 2015 pukul 19.21 WIB

David Volodzko, *China's Role in Syria Crisis, Revisited : A Look at History proves China's Leading Role in Arming the Assad Regime, thus Contributing to Today's Civil War*, di update tanggal 28 September 2015, terdapat di [thediplomat.com/2015/09/chinas-role-in-the-syria-crisis-revisited/](http://thediplomat.com/2015/09/chinas-role-in-the-syria-crisis-revisited/) diakses pada 17 Desember 2015 pukul 15.20 WIB

Economic and Commercial Councillor's Office of the Embassy of People's Republic of China in The Syrian Arab Republic, *"Brief Introduction of China-Syria Trade..."*, <http://sy2.mofcom.gov.cn/aarticle/bilateralcooperation/inbrief/200412/20041200008533.htm> diakses 20 Juni 2015

HRW, *Attacks on Ghouta : Analysis of Alleged Use of Chemical Weapons in Syria*, terdapat di [https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria\\_cw0913\\_web\\_1.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria_cw0913_web_1.pdf) diakses pada 17 Desember 2015 pukul 08.57 WIB

ICRC, *Conference of the States Parties to the Chemical Weapons Convention, 2015*, 02 Desember 2015 terdapat di



<https://www.icrc.org/en/document/conference-states-parties-chemical-weapons-convention-2015> diakses  
pada 16 Desember 2015 pukul  
22.30